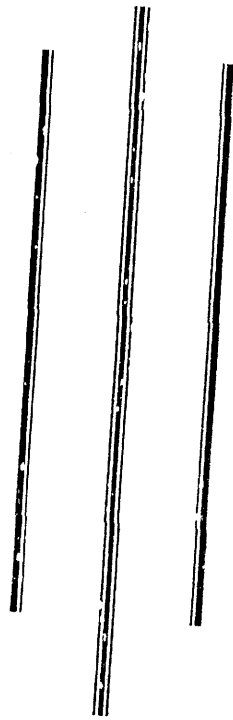


**RENCANA STRATEGIS BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



TAHUN 2014 - 2019

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik ke desentralisasi merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memberiklan peluang dan kesempatan kepada Pemerintah Daerah mengoperasikan secara optimal berbagai potensi daerah. Untuk itu dibutuhkan kelembagaan Pemerintah daerah yang kuat dan efektif sebagai motivator, fasilitator dan pengaruh dalam dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan tujuan.

Langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut akan dimulai dari pembangunan politik. Salah satu definisi pembangunan politik adalah sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu bermakna perbaikan dan semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di segala aspek kehidupan yang ada. Segala pembangunan diberagam bidang akan mudah terealisasi apabila terlebih dulu kondisi dan pembangunan politik suatu daerah berjalan lancar, aman dan kondusif.

Undang - Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahanya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Secara substansial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng rappang Tahun 2013 - 2018 memuat kerangka makro perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disusun berdasarkan Visi, misi, agenda, prioritas pembangunan dan program Kepala daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan Daerah lima tahunan. RPJMD ini dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan daerah RPJMD ini sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Strategis (Renstra) bagi Satuan Perangkat Kerja daerah (SKPD) termasuk Badan Kesbang dan Linmas supaya terwujud proses pembangunan yang bersinergi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka menjadi suatu kewajiban bagi setiap SKPD untuk menyusun Renstra masing - masing. Rencana strategis itu merupakan rencana induk yang komprehensif yang menyatakan bagaimana organisasi perangkat daerah akan mencapai visi, misi, dan tujuannya dimasa mendatang. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang menurut Peraturan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Badan Kesbang dan Linmas. Badan kesbang dan Linmas merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan di bidang Kesatuan bangsa dan

Setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun rencana Strategis harus sesuai dengan visi, misi Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 – 2018 merupakan satu bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJP Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD.

Berikut pengertian, fungsi, proses penyusunan serta keterkaitan perencanaan strategis dengan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) :

a. Pengertian Renstra

Perencanaan Strategis menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lima tahun.

b. Fungsi Renstra

Fungsi Renstra adalah :

1. Kerangka acuan untuk menyusun anggaran tahunan.
2. Alat pengembangan manajemen
3. Mekanisme untuk memaksa manajemen untuk berfikir kedepan
4. Membantu manajemen untuk pengarahannya masa depan
5. Membantu untuk memikirkan tindakan jangka pendek yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi.

c. Proses Penyusunan Renstra

Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, lebih lanjut pada ayat (2) menyatakan bahwa tahapan penyusunan renstra SKPD terdiri dari :

1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan
4. Penetapan Renstra SKPD

Berikut pengertian, fungsi, proses penyusunan serta keterkaitan perencanaan strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) :

a. Pengertian Renstra

Perencanaan Strategis menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) untuk lima tahun.

b. Fungsi Renstra

Fungsi Renstra adalah

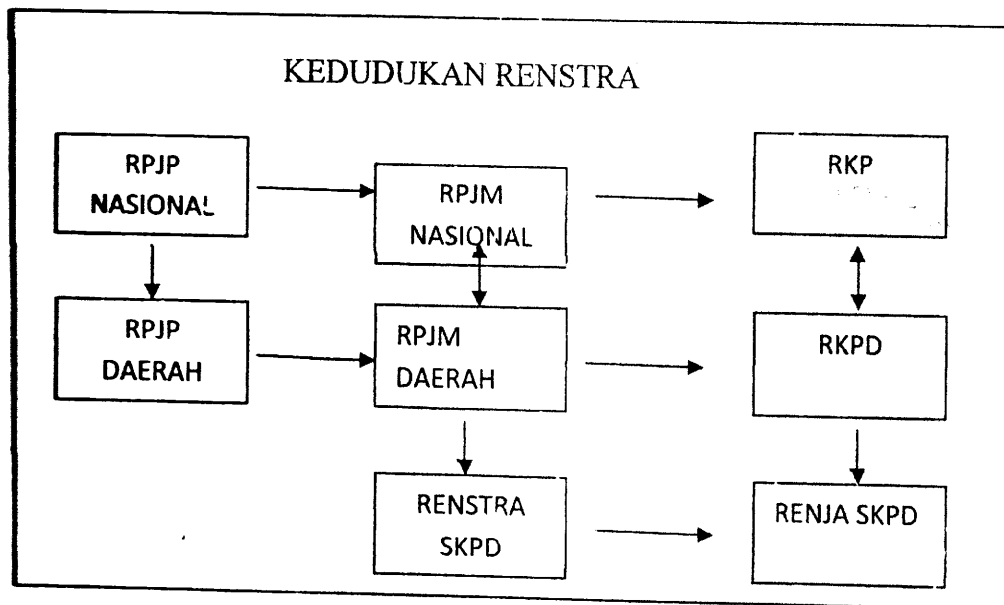
1. Kerangka acuan untuk penyusunan anggaran tahunan
2. Alat pengembangan manajemen
3. Mekanisme untuk memaksa manajemen berpikir kedepan
4. Membantu manajemen untuk pengarahannya masa depan
5. Membantu untuk memikirkan tindakan jangka pendek yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi.

c. Proses Penyusunan Renstra

Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, lebih lanjut pada ayat (2) menyatakan bahwa tahapan penyusunan Renstra SKPD terdiri dari :

1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan
4. Penetapan Renstra SKPD

d. Bagan Alur Kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Renstra :

- 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).**
- 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).**
- 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara nomor 4389).**
- 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Nomor 4548).**
- 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).**
- 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);**
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahn Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);**
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);**
- 9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Ummat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.**
- 10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.**
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehniks Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peraturan pemerintah daerah Kabupaaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesbang Dan Linmas;

Latar Belakang dan Tujuan

Latar Belakang

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

- 1. Untuk Menjabarkan Kebijakan/Program RPJMD.
- 2. Menyiapkan Acuan bagi Rencana Kerja Badan Kesbang Dan Linmas
- 3. Menyiapkan Kerangka Evaluasi Kinerja Bagi Badan Kesbang Dan Linmas yang akan dilaksanakan oleh aparat Pengawasan.

Tujuan

Adapun tujuan dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbang Dan Linmas adalah Agar terbangun konsistensi Perencanaan dalam Perwujudan capaian Rencana Kerja Badan Kesbang Dan Linmas.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Landasan Hukum**
- 1.3. Maksud dan Tujuan**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi**
- 2.2. Sumber Daya**
- 2.3. Kinerja Pelayanan**
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Bab III. Issu-issu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih**
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dan Provinsi**
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD**
- 3.5. Penentuan Issu-issu Strategis**

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Visi dan Misi**
- 4.2. Tujuan Dan Sasaran**
- 4.3. Strategi dan Kebijakan**

Bab V. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 5.1. Program dan Kegiatan**
- 5.2. Indikator Kinerja**
- 5.3. Kelompok Sasaran**
- 5.4. Pendanaan Indikatif**

Bab VI. INDIKATOR KINERJA BADAN KESBANG DAN LINMAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1. Indikator Kinerja Badan Kesbang dan Linmas yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

Bab VII. PENUTUP

- 7.1. Penutup**

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Kabupaten Sidenreng Rappang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesbang Linmas.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
3. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang Hubungan antar lembaga, bidang Kesatuan Bangsa, dan bidang perlindungan masyarakat.
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Hubungan antar lembaga, bidang Kesatuan Bangsa, dan bidang perlindungan masyarakat.
6. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
7. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati pada bidang Hubungan antar lembaga, bidang kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

Badan Kesbang dan Limas Kab. Sidrap terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan
 - 2. Sub. Bidang Hub. Organisasi Kemasyarakatan
- d. Bidang Kesatuan Bangsa
 - 1. Sub Bidang Pembauran
 - 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan
 - 2. Sub. Bidang Peningkatan SDM Satuan Linmas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Lampiran : Peraturan Daerah Sidrap
Normor : 26 Tahun 2008

KEPALA BADAN KESBANG
DAN LINMAS
Drs. M A K M U R
19580413 198603 1 014

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS
Drs. H.ANDI BAHARUDDIN
19670505 200212 1 005

KA. SUBAG
JUMUM & KEPEGAWAIAN
HJ. KASRAH, SE
19621231 199203 2 042

KA. SUBAG
PERENCANAAN
ANDI SUDIRMAN, SE
19750511 200212 1 007

KA. SUBAG
KEUANGAN
RAMLAH RAHMAN, S.SOS
19650127 198503 2 007

KABID
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
HALMAN, S.Sos
19621231 198903 1 166

KASUBID
IUB. ORG. KEMASYARAKATAN
A. MAPPANYUKKI, S.Ip
19680817 199503 1 001

KASUBID
KELEMBAGAAN
ANDI ANZAR SAPPAILE, ST.i
19751201 200312 1 011

KABID
KESATUAN BANGSA
Dra. Hj. RAHMI HASYAMIN, MM
19590815 198603 2 014

KASUBID
PEMBAURAN
Hj. NUR ANI
19590626 198302 2 005

KASUBID
WAWASAN DAN KEBANGSAAN
Drs. SUPRATMAN, MH
19631231 199003 1 144

KABID
PERLINDUNGAN MASYARAKA
SUDIRMAN MEKKAH, SE
1919611231 199503 1 015

KASUBID
KESIAGAAN
A.NASARUDDIN,S.T
19670808 200312 1 003

KASUBID. PENINGKATAN
SDM SATUAN LINMAS
ROSNAINI, SE
19691231 199803 2 027

Uraian tugas dan fungsi sekretariat dan bidang – bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin Badan Kesbang dan Linmas Kab. Sidrap dalam hal menyusun dan menetapkan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja badan, membina dan pengkoordinasian unit kerja dengan instansi terkait, melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan nilai- nilai sejarah kebangsaan

2. Sekretariat

Mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja sekretariat, menghimpun dan mengkompilasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dari setiap setiap bidang dalam lingkup Badan kesbang dan Linmas, mengkoordinasikan dengan Kepala Badan dan para Kepala Bidang, Menyelenggarakan penatausahaan dan ketatalaksanaan urusan perencanaan umum, keuangan, urusan umum dan kepegawaian.

3. Bidang Hubungan Antar Lembaga

Mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis Bidang Hubungan Antar Lembaga, Menyusun rancangan rencana Anggaran Satuan kerja bidang, Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja bidang dengan Kepala badan dan Sekretariat Badan serta para Kepala Bidang lingkup Badan kesbang Linmas, Menyelenggarakan perumusan penetapan kinerja bidang dalam rangka penetapan kinerja Badan Kesbang dan Linmas, Membina dan mengkoordinir Sub Bidang di lingkup Bidang Kesbang dan Linmas, Mendistribusikan Tugas dan memberi petunjuk kepada para Kepala Sub Bidang di lingkup Bidang Hubungan Antar lembaga, Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan perumusan konsep teknis operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagan partai politik, serta budaya dan pendidikan politik, serta membuat laporan secara berkala.

4. Kesatuan Bangsa

Mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja bidang, mengkoordinasikan dengan Kepala Badan, Sekretariat badan dan kepala-kepala bidang lingkup Badan Kesbang dan Linmas, Membina dan mengkoordinasikan para Kasubid lingkup bidang Kesatuan Bangsa, Menyelenggarakan urusan administrasi umum dan menyusun pedoman penyelenggaraan tugas penetapan kebijakan teknis operasional dibidang ketahanan ideologi negara dan wawasan kebangsaan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang, serta membuat laporan secara berkala

Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja bidang, mengkoordinasikan dengan Kepala Badan, Kepala Badan dan Kepala – Kepala Bidang lingkup badan Kesbang dan Linmas, dan mengkoordinasikan para Kasubid lingkup bidang perlindungan masyarakat, menyelenggarakan urusan administrasi umum, menyusun pedoman penyelenggaraan tugas perlindungan masyarakat, melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang.

2. Sumber Daya

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat didukung oleh sumber daya yang telah ada diantaranya sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas.

Jumlah dan kualitas personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang ada pada saat ini :

No	Uraian	Eselon			Pendidikan			Golongan				Jenis Kelamin	
		II	III	IV	SLTA	SI	S2	I	II	III	IV	L	P
1	Struktural	1	4	9	2	12	6		1	13	6	14	6
2	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Staf				1	3	2						
4	Tenaga Sukarela				8	4							

Selain masalah kualitas dan kuantitas, masih terdapat beberapa kelemahan ber' dengan kondisi internal organisasi yang berpotensi menghambat peningkatan pelay' Kesbang dan Linmas Kab. Sidrap, kelemahan yang dimaksud antara lain m' pegawai khususnya pengantar surat (caraka), Sopir, Operator komputer umum. Mengingat perkembangan kebutuhan ke depan, maka penambah' kualitas sumber daya manusia (aparatur) merupakan hal mendesak v

2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di **dukung** sejumlah sarana dan prasarana meliputi inventaris / peralatan kantor, kendaraan dinas **dan perlengkapan** lainnya.

a. Inventaris / peralatan kantor terdiri dari :

1. Alat kantor dan rumah tangga

- Air Conditioner (AC) : 5 buah
- Kamera digital : 2 buah
- Komputer : 7 buah
- Dispenser : 2 buah
- Filling Cabinet : 4 buah
- Flasdisk : 4 buah
- Hardisk Eksternal : 1 buah
- Kipas angin : 1 buah
- Kursi : 22 buah
- Meja : 56 buah
- Laptop : 2 buah
- Lemari Arsip : 5 buah
- Papan White Board : 5 buah
- Scaner : 1 buah
- Televisi : 2 buah

b. Kendaraan Dinas terdiri dari :

Kendaraan dinas yang dimiliki sebanyak 1 unit kendaraan roda empat dan 10 unit

kendaraan roda dua, dengan rincian seagai berikut :

NO	Jenis Barang / Merek	Unit	Tahun
1	Kijang Innova	1 Unit	2005
2	Shogun 125	3 Unit	2005
3	Shogun Arashi 125	1 Unit	2006
4	Shogun 125	4 Unit	2009
5	Suzuki smash titan SR/FW 110 SC	2 unit	2013

Kinerja Pelayanan SKPD (Tabel T.IV.C2 dan T.IV.C3)

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan politik dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya yang senantiasa memberikan pelayanan dibidang kesatuan bangsa dan lingkungan telah memprioritaskan program strategis dan arah kebijakan yang tercermin dalam tabel berikut :

Target Kinerja Badan Kesbang dan Linmas Kab. Sidrap

Indikator Kinerja	2009	Indikator Kinerja	2010	Indikator Kinerja	2011	Indikator Kinerja	2012	Indikator Kinerja	2013
Tersedianya gaji pegawai	100%	Tersedianya gaji pegawai	100%	Tersedianya gaji pegawai	100%	Tersedianya gaji pegawai	100%		
Terciptanya kelancaran komunikasi dan tugas kantor	100%	Terciptanya kelancaran komunikasi dan tugas kantor	100%	Adanya jasa komunikasi, air, listrik yang cukup	100%	Adanya jasa komunikasi, air, listrik yang cukup	100%		
Terpelelihanya perabotan kantor	100%	Terpelelihanya kendaraan dinas	100%	Terselenggaranya aktivitas kantor	100%	Terselenggaranya aktivitas kantor	100%		
Terpelelihanya Kendaraan Dinas	100%	Terpelelihanya Administrasi Kantor	100%	Terselenggaranya administrasi keuangan	100%	Terselenggaranya administrasi keuangan	100%		
Terpelelihanya Administrasi Kantor	100%	Terpelelihanya kebersihan kantor	100%	Terselenggaranya tugas-tugas kantor	100%	Terselenggaranya tugas-tugas kantor	100%		
Tersedianya ATK	100%	Terlengkapinya penerangan kantor	100%	Terselenggaranya penerangan kantor	100%	Terselenggaranya penerangan kantor	100%		
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	100%		

	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	100%		
	100%	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	Tersedianya perlengkapan kantor	100%		
	100%	Terselenggaranya pembangunan gedung kantor	100%	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	100%	Terselenggaranya pembangunan gedung kantor	100%		
	100%	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	100%	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	100%	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	100%		
	100%	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	100%		
	100%	Tersedianya pos pengamanan	100%	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100%	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100%		
	100%	Tersedianya satuan keamanan	100%	Tersedianya pos pengamanan	95%	Tersedianya pos pengamanan	95%		
	100%	Tersedianya aparat keamanan	100%	Terlatihnya satuan keamanan	100%	Tersedianya tenaga informan dari kecamatan	100%		

					n			
100%	Tersenggaranya FKDM	100%	Tersediannya aparat keamanan	100%	Tersedianya aparat keamanan	100%		
100%	Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan	100%	Terpenuhi nya rasa toleransi dalam beragama	100%	Terpenuhi nya rasa toleransi dalam beragama	100%		
100%	Terselenggaranya pendataan LSM/Ormas	100%	Terpenuhi nya sosialisasi	100%	Terselenggaranya FPK	100%		
100%	Tersediannya satuan keamanan	100%	Terselenggaranya FPK	100%	Tersedianya satuan keamanan	100%		
100%			Tersedianya satuan keamanan	100%	Terselenggaranya FKDM	100%		
100%			Terselenggaranya FKDM	100%	Terselenggaranya pos keamanan Pilgub	100%		
					Terselenggaranya sosialisasi Ormas	100%		

Realisasi Capaian Badan Kesbang dan Linmas Kab. Sidrap

	2009	Indikator Kinerja	2010	Indikator Kinerja	2011	Indikator Kinerja	2012	Indikator Kinerja	2013
	94 %	Tersedianya gaji pegawai	94,31%	Tersedianya gaji pegawai	95%	Tersedianya gaji pegawai	86%	Tersedianya gaji pegawai	
	11 %	Terciptanya kelancaran komunikasi dan tugas kantor	34,42%	Adanya jasa komunikasi, air, listrik yang cukup	29%	Adanya jasa komunikasi, air, listrik yang cukup	65%		
	86 %	Terpeliharanya kendaraan dinas	52,29%	Terselenggaranya aktivitas kantor	95%	Terselenggaranya aktivitas kantor	81%		
	100%	Terpenuhi nya Administrasi Kantor	9,90%	Terselenggaranya administrasi keuangan	10%	Terselenggaranya administrasi keuangan	92%		
	80%	Terpeliharanya kebersihan kantor	10%	Terselenggaranya tugas-tugas kantor	10,8 %	Terselenggaranya tugas-tugas kantor	100%		
	100%	Terlengkapinya penerangan kantor	100%	Terselenggaranya penerangan kantor	87%	Terselenggaranya penerangan kantor	100%		
	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	99,78%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	99%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	78%		
	90%	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	99,88%	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	48%	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	80%		

	94%	Tersedianya perlengkapan kantor	91,75%	Tersedianya perlengkapan kantor	99,9%	Tersedianya perlengkapan kantor	98%		
	95%	Terselenggaranya pembangunan gedung kantor	94,68%	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	99,21%	Terselenggaranya pembangunan gedung kantor	92%		
	100%	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	83,50%	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	99,9%	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	99,8%		
	19%	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	84%		
	100%	Tersedianya pos pengamanan	0%	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100%	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100%		
	29%	Tersedianya satuan keamanan	100%	Tersedianya pos pengamanan	95%	Tersedianya pos pengamanan	95%		
	100%	Tersedianya aparat keamanan	61%	Terlatihnya aparat keamanan	100%	Tersedianya tenaga informan dari kecamatan	92%		
	68%	Terselenggaranya FKDM	0%	Tersedianya aparat keamanan	99,9%	Tersedianya aparat keamanan	99%		

Terpenuhi nya pembinaan LSM/Ormas	0%	Terselenggara nya pembinaan wawasan kebangsaan	91%	Terpenuhi nya rasa toleransi dalam beragama	94%	Terpenuhi nya rasa toleransi dalam beragama	84%		
Terbentuk nya Wawasan Kebangsaan	10%	Terselenggara nya pendataan LSM/Ormas	0%	Terpenuhi nya sosialisasi	0%	Terselenggara nya FPK	59%		
Terbentuk nya forum kebangsaan	100%	Tersedianya satuan keamanan	84,68%	Terselenggara nya FPK	49,9 %	Tersedianya satuan keamanan	99,2 %		
Terbentuk nya satuan keamanan	100%			Tersedianya satuan keamanan	99,5 %	Terselenggara nya FKDM	39%		
Terpenuhi nya keperluan pembina legislatif dan 2009	100%			Terselenggara nya FKDM	93%	Terselenggara nya pos keamanan Pilgub	0%		
						Terselenggara nya sosialisas i Ormas	0%		

Ratio Capaian Badar, Kesbang dan Linmas Kab. Sidrap

Indikator Kinerja	2009	Indikator Kinerja	2010	Indikator Kinerja	2011	Indikator Kinerja	2012	Indikator Kinerja	2013
Tersedianya gaji pegawai	94 %	Tersedianya gaji pegawai	45%	Tersedianya gaji pegawai	50%	Tersedianya gaji pegawai	86,65%	Tersedianya gaji pegawai	
Tersedianya kelancaran komunikasi dan tugas kantor	11 %	Tersedianya kelancaran komunikasi dan tugas kantor	94,31%	Adanya jasa komunikasi, air, listrik yang cukup	95,46%	Adanya jasa komunikasi, air, listrik yang cukup	64,87%		
Terpeliharanya kendaraan kantor	86 %	Terpeliharanya kendaraan dinas	34,42%	Terselenggaranya aktivitas kantor	29,05%	Terselenggaranya aktivitas kantor	81,01%		
Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100%	Terpeliharanya Administrasi Kantor	52,29%	Terselenggaranya administrasi keuangan	94,69%	Terselenggaranya administrasi keuangan	91,77%		
Terpenuhi nya Administrasi Kantor	80%	Terpeliharanya kebersihan kantor	99,90%	Terselenggaranya tugas-tugas kantor	101,26%	Terselenggaranya tugas-tugas kantor	100%		
Tersedianya ATK	100%	Terlengkapinya penerangan kantor	100%	Terselenggaranya penerangan kantor	108,22%	Terselenggaranya penerangan kantor	100%		
Tersedianya barang konsumsi dan perlengkapan	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	78%		
Tersedianya perjalanan dinas kantor	9%	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	99,78%	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	98,83%	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	79,65%		
Tersedianya perlengkapan pegawai	94%	Tersedianya perlengkapan kantor	99,88%	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	Tersedianya perlengkapan kantor	99,49%		

Ratio Capaian Badan Kesbang dan Linmas Kab. Sidrap

	2009	Indikator Kinerja	2010	Indikator Kinerja	2011	Indikator Kinerja	2012	Indikator Kinerja	2013
	94 %	Tersedianya gaji pegawai	45%	Tersedianya gaji pegawai	50%	Tersedianya gaji pegawai	86,65%	Tersedianya gaji pegawai	
	11 %	Terciptanya kelancaran komunikasi dan tugas kantor	94,31%	Adanya jasa komunikasi, air, listrik yang cukup	95,46 %	Adanya jasa komunikasi, air, listrik yang cukup	64,87%		
	86 %	Terpeliharanya kendaraan dinas	34,42%	Terselenggaranya aktivitas kantor	29,05 %	Terselenggaranya aktivitas kantor	81,01%		
	100%	Terpenuhinya Administrasi Kantor	52,29%	Terselenggaranya administrasi keuangan	94,69 %	Terselenggaranya administrasi keuangan	91,77%		
	80%	Terpeliharanya kebersihan kantor	99,90%	Terselenggaranya tugas-tugas kantor	101,26%	Terselenggaranya tugas-tugas kantor	100 %		
	100%	Terlengkapinya penerangan kantor	100%	Terselenggaranya penerangan kantor	108,22%	Terselenggaranya penerangan kantor	100 %		
	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	100%	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	78 %		
	9%	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	99,78%	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	98,83 %	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	79,65%		
	94%	Tersedianya perlengkapan kantor	99,88%	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	Tersedianya perlengkapan kantor	99,49%		

		as							
Terbentuknya forum kebangsaan	74%	Tersedianya satuan keamanan	91%	Terselenggaranya FPK	49,93%	Tersedianya satuan keamanan	99,27%		
Terbentuknya satuan keamanan	76%	Terbentuknya satuan keamanan	84,68%	Tersedianya satuan keamanan	99,54%	Terselenggaranya FKDM	36,24%		
Terpenuhiya keperluan pemilu legislatif dan 2009	100%			Terselenggaranya FKDM	92,68%	Terselenggaranya pos keamanan Pilgub	0%		
						Terselenggaranya sosialisasi Ormas	0%		

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu Strategis

Analisis Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya badan kesatuan bangsa dan masyarakat Kab. Sidrap tidak lepas dari permasalahan baik dari internal dan eksternal yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas dan mengancam kesatuan dan keamanan bangsa diantaranya adalah

Permasalahan Internal

Kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah pegawai maupun dari sisi kemampuan pegawai

Minimnya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Sidrap dalam menunjang tugas dan tanggungjawab badan kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sidrap

Permasalahan Eksternal

Adaptasinya potensi konflik vertikal dan horizontal yang bermuansa SARA

Minimnya tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Minimnya tingginya kesenjangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan

Adaptasinya gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan

Minimnya optimalnya organisasi parpol dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat

Minimnya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang cenderung anarkis

Minimnya masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok

Minimnya kepentingan umum

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Terwujudnya kualitas kehidupan yang demokratis, partisipatif, harmonis dalam **membedayakan** masyarakat berbangsa dan bernegara. Dimana salah satu sasarannya **adalah peningkatan** kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak **kejahatan**.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi harus **menyusun** misi yang jelas yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan **Polisi dan** perlindungan masyarakat Kab. Sidrap ,maka dirumuskan misi Badan **Kesatuan Bangsa dan** Perlindungan Masyarakat Kab.Sidrap sebagai berikut:

Mengembangkan Sistem Politik Yang Adil dan Demokratis Berdasarkan Pancasila **Dan** UUD1945 Serta Meningkatkan Kinerja Kemandirian Infrastruktur Potik Dalam **Kehidupan** Berbangsa Dan Bernegara.

- 2. Meningkatkan** integritas, Persatuan dan kesatuan pembauran bangsa.
- 3. Meningkatkan** peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
- 4. Menciptakan** situasi dan kondisi IPOLEKSOSBUD yang kondusif.

Tujuan

Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab **dalam** kehidupan berpolitik yang harmonis,dinamis serta dalam suasana yang **demokratis**.

Terlaksannya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen **masyarakat** dalam rangka memfasilitasi, penyelesaian permasalahan aktual yang dapat **mengganggu** keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat.

Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi terjadinya berbagai **peristiwa / konflik**

Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan **fungsi – fungsi** organisasinya

A. Sasaran

- **Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis serta mempunyai hubungan supra dan infra struktur politik di daerah.**
- **Meningkatnya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan secara cepat dan tepat.**
- **Menurunnya penyalahgunaan narkoba oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum**
- **Meningkatnya kualitas SDM, Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya**

Strategi

- **Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda**
- **Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.**
- **Meningkatkan peran Organisasi Masyarakat dan LSM sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan keormasan**
- **Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum**

Kebijakan

- **Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum melalui pendidikan budaya dan etika politik**
- **Meningkatkan kualitas SDM dan Data Organisasi kemasyarakatan.**
- **Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mencoba narkoba dan menurunkan jumlah pecandu narkoba melalui penjelasan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum tentang bahaya narkoba**

• Terwujudnya kualitas kehidupan yang demokratis, partisipatif, harmonis dalam memberdayakan masyarakat berbangsa dan bernegara

Mengembangkan Sistem Politik Yang Adil dan Demokratis Berdasarkan Pancasila Dan UUD1945 Serta Meningkatkan Kinerja Kemandirian Infrastruktur Potik Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.

...nya
...an
...kat
...hak,
...an, dan
...ng
...daim
...an
...k
...ina
...serta
...nana
...k
...nya
...i
...baik
...terkait
...n
...paca
...nkat
...n rangka
...fasilitasi,
... penyelesaian
... permasalahan
... aktual yang
... dapat
... menganggu
... keamanan dan
... ketertiban
... dilingkungan
... masyarakat.

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum melalui pendidikan budaya dan etika politik
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. - Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. - Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mencoba narkoba dan menurunkan jumlah pecandu narkoba melalui penjelasan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum tentang bahaya narkoba

Tersedianya SDM Organisasi Masyarakat yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya	- Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya	- Meningkatkan peran Organisasi Masyarakat dan LSM sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan keOrmanan	
---	--	--	--

Visi : Terwujudnya kualitas kehidupan yang demokratis, partisipatif, harmonis dalam memberdayakan masyarakat berbangsa dan bernegara

Misi 2 : Mengembangkan Sistem Politik Yang Adil dan Demokratis Berdasarkan Pancasila Dan UUD1945 Serta Meningkatkan Kinerja Kemandirian Infrastruktur Potik Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai prilaku dan luhur didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka ragam budaya, suku, ras, dan agama.	1. Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda	1. Membangun semangat rasa persatuan dan kesatuan yang berwawasan Nusantara kepada Masyarakat, pelajar, dan mahasiswa serta organisasi masyarakat melalui sosialisasi, dialog, seminar, 2. Meningkatkan peran dan fungsi FKUB dan FPK dalam memelihara kerukunan antar suku bangsa dan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat melalui rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait.	1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya

2 : Terwujudnya kualitas kehidupan yang demokratis, partisipatif, harmonis dalam memberdayakan masyarakat berbangsa dan bernegara

3 : Menjaga ketertiban, Keamanan dan kedamaian dalam masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>Menciptanya suasana Kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang penuh kedamaian</p>	<p>- Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang</p>	<p>- Melakukan Sosialisasi dan pendekatan - pendekatan kepada masyarakat dengan melalui pertemuan-pertemuan berupa Rapat Koordinasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Wilayah Kab. Sidrap.</p>	<p>Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting per:ciptaan kondisi keamanan di Masyarakat</p>

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang telah dirumuskan diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Perlidungan Masyarakat Kab. Sidrap merumuskan dan menetapkan Program yaitu :

1. Program peningkatan Sumber Daya Aparatur
2. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3. Program Pengembangan kemitraan Wawasan kebangsaan
4. Program Peningkatan keamanan, dan kenyamanan Lingkungan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN
<p>Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan beragama dalam ragaman budaya suku, ras, dan agama</p>	<p>-Meningkatnya interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing</p> <p>-Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda</p>	<p>-Jumlah masyarakat yang telah diberi pemahaman</p> <p>-Jumlah kelompok kerja/forum yang membantu dalam melakukan pemahaman</p> <p>-Jumlah Kegiatan untuk memberikan pemahaman</p>		<p>Program pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>-Pendidikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda</p> <p>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>-Pembentukan pokja wawasan kebangsaan</p> <p>Forum pembauran Kebangsaan (FPK)</p> <p>Forum kerukunan umat beragama (FKUB)</p>
<p>Peningkatan SDM Organisasi masyarakat yang fungsional dalam menjalankan Fungsi-fungsinya</p>	<p>-Meningkatnya kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsinya</p>	<p>-Jumlah SDM organisasi yang telah diberi pemahaman</p>		<p>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>-Sosialisasi Permendagri No.33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan lingkungan kementerian Dalam negeri dan pemerintah daerah</p>

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE -				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keaneka ragaman budaya suku, ras, dan agama	Meningkatnya interaksiantara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam: bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing - Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda	-Jumlah masyarakat yang telah diberi pemahaman	100 org	115 org	120 org	125 org	130 org
			-Jumlah kelompok kerja/forum yang membantu dalam melakukan pemahaman	3 pokja/ forum	3 pokja/ forum	3 pokja/ forum	3 pokja/ forum	3 pokja/ forum
			-Jumlah Kegiatan untuk memberikan pemahaman	1 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg
2.	Tersedianya SDM Organisasi kemasyarakatan yang Propessional dalam menjalankan Fungsi-fungsi organisasinya	-Meningkatnya kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsinya	-Jumlah SDM organisasi yang telah diberi pemahaman	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org
3.	Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan 4 pilar kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pilar kebangsaan	-Jumlah masyarakat yang telah diberi pemahaman	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN
- Terciptanya suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang penuh kedamaian	-Meningkatnya rasa keamanar., ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.	-Jumlah masyarakat yang telah diberi pemahaman -Jumlah Peserta		-Penyuluhan kewaspadaan dini bagi tokoh adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LSM/Ormas dan unsur Perguruan Tinggi Tingkat Kabupaten
- Terciptanya situasi keamanan lingkungan yang kondusif	-Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya keamanan dan ketertiban	-Jumlah Peserta		-Penyuluhan kewaspadaan dini bagi tokoh adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LSM/Ormas dan unsur Perguruan Tinggi Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sidrap -Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bersama Dewan Pembina dan pengurus di Tingkat desa dan Kelurahan - Rapat Koordinasi bersama Dewan Pembina dan Pengurus FKDM Tingkat Kabupaten

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE -				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	-Terciptanya suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang penuh kedamaian	Meningkatnya Rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.	-Jumlah masyarakat yang telah diberi pemahaman	100 org	150 org	200 org	250 org	300 org
			-Jumlah kegiatan untuk memberikar pemahaman	1 Keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg
2	-Terciptanya situasi keamanan lingkungan yang kondusif	-Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya keamanan dan ketertiban.	-Jumlah Masyarakat yang sudah diberikan pemahaman	50 org	75 org	100 org	125 org	150 org

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang telah dirumuskan diatas, maka Badan kesbang dan Linmas Kabupaten Sidenreng Rappang merumuskan program yaitu :

1. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
2. Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Kemitraan Pemeliharaan Kerukunan dalam mendukung kerukunan nasionla
5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tabel indikator rencana program prioritas Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Program dan kegiatan	Indikator Kinerja program	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi	
			2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
			Tar get	Rp. Juta	Tar get	Rp. Juta	Targ et	Rp. Juta	Targ et	Rp. Juta	Targ et	Rp. Juta	Lapora n	Rp. Juta			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Facilitas penguatan intelijen KOMINDA	Jumlah rapat/laporan	72	271.116	84	315.852	84	315.852	84	315.852	84	315.852	84	315.852	408	1.534.524		
Pembinaan terhadap Ortkemas	Jumlah Ortkemas	23	-	23	15	23	17	23	23	17	23	20					
Sosialisasi	Ortkemas	-	-	150	35	150	35	150	150	35	150	35					
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta	100 org	64	120	70	130	80	140	150	90	150	90	630	389			
	Jumlah laporan	1	12	1	15	1	20	1	2	25	2	30	7	102			
	Jumlah pertemuan FPK tingkat Kabupaten	6	62	6	65	6	70	6	6	75	6	80	30	352			
	Jumlah pertemuan FPK tingkat Kecamatan	11	55	11	56	11	57	11	11	58	11	59	55	285			
	Jumlah pertemuan FKUB	6	95	6	100	6	105	6	6	110	6	115	30	525			
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan	2	40	2	45	2	50	2	2	55	2	60	10	250			
Kewaspadaan Dini	Jumlah peserta	50 org	40	50 org	50	50 org	60	50 org	50 org	70	50 org	80	290 org	290			
	Jumlah laporan																
	Jumlah pertemuan FKDM	3		3		3		3	3		3		3	18			
	Jumlah Kegiatan	1		1		1		1	1		1		1	6			

Indikator program	Kondisi awal	Prioritas	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir
			Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	
2	3	4	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	7
Terwujudnya sarana dan prasana aparatur	Belum ada	Pengadaan kendaraan operasional	Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2		Kendaraan dinas operasional kesbang		1 Unit Roda 4 4 Unit Roda 2		2 Unit Roda 4 2 Unit Roda 2		2 unit roda 4 6 unit roda 2		
Terwujudnya sarana dan prasana aparatur	Belum ada	Tersedianya infokus, kamera dan warless	Terselenggara tugas-tugas kantor dengan baik		Terselenggara tugas-tugas kantor dengan baik	30.000.000	Terselenggara tugas kantor dengan baik	35.000.000	Terselenggara tugas kantor dengan baik	40.000.000	Terselenggara tugas kantor dengan baik	45.000.000	
Terpenuhiya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12.000.000	Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	16.000.000	Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	20.000.000	Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	24.000.000	Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	28.000.000	
Terpeliharanya aktifitas kantor	ada	Terselenggara aktifitas kantor	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	67.000.000	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	70.000.000	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	75.000.000	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	78.000.000	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	80.000.000	
Terciptanya pemeliharaan gedung kantor	ada	Terpeliharanya halaman gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan anhalaman gedung kantor	40.000.000	Terlaksananya pemeliharaan anhalaman gedung kantor	60.000.000	Terlaksananya pemeliharaan anhalaman gedung kantor	65.000.000	Terlaksananya pemeliharaan anhalaman gedung kantor	70.000.000	Terlaksananya pemeliharaan anhalaman gedung kantor	80.000.000	
Deteksi Dini dan pencegahan Tindak Kriminal	70%	Semua kegiatan yang ada dalam masyarakat	72 kegiatan	271.440.000	84 kegiatan	313.152.000	84 kegiatan	313.152.000	96 kegiatan	357.888.000	96 kegiatan	357.888.000	80%

Indikator	Unit	195 org	2 Keg	40.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	20.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	30.000.000	200 org
Kapasitas ORKEMAS (org)	Jumlah ormas/LSM	50 orang	-	-	1 kali	15.000.000	1 kali	20.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	30.000.000	200 org
	Kapasitas FKUB/FPK	3 kali	3 kali	56.985.000	6 kali	100.000.000	6 kali	105.000.000	6 kali	110.000.000	6 kali	115.000.000	27 kali
	Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	1 Tkt Kab	3 kali	53.485.5000	6 kali	655.000.000	6 kali	70.000.000	6 kali	75.000.000	6 kali	80.000.000	27 kali
Cakupan peningkatan kapasitas wawasan kebangsaan	11 Tkt Kec	11 Tkt Kec	11 kali	55.000.000	11 kali	56.000.000	11 kali	57.000.000	11 kali	58.000.000	11 kali	59.000.000	111 kali
	Keterlibatan, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	120 org	70.000.000	120 org	80.000.000	120 org	85.000.000	120 org	90.000.000	480 Org
Pembangunan pos jaga/ronda	31 linmas	60 pos kamling	12 bulan	12.700.000	15 linmas	169.050.000	-	69.050.000	-	69.050.000	-	69.050.000	100%
	Keamanan lingkungan	Keamanan lingk.	Desa/Kel.	402.000.000	70	525.000.000	75	562.500.000	80	600.000.000	85	637.500.000	100%

Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum dan pengembangan kebijakan yang progender, propour, projob, dan proinironmen	Pembangunan	Sarana dan prasarana aparatur belum terpenuhi Sarana dan prasarana aparatur belum terpenuhi Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik masih minim Pelayanan Adm. Perkantoran Penyediaan jasa Pem. Dan perizinan kendaraan dinas operasional Pemeliharaan gedung kantor	Peingkatan Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya perlengkapan kantor Peningkatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya perlengkapan kantor Terpeliharanya aktivitas kantor Terpenuhinya peralatan kantor yang baik	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya infokus, kamera dan wireless Terpenuhinya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tersedianya perlengkapan kantor Terpeiiharanya aktivitas kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan pereliharaanya kendaraan dinas operasional Terlaksananya tugas – tugas kantor Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terselenggaranya tugas-tugas kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
--	-------------	--	---	---	---	------	------	------	------	------

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KESBANG DAN LINMAS

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA KESBANGPOL					REALISA SI TAHUN 2012	PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
			2011	2012	2013	2014	2015		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
1	Partai Politik -Jumlah Parpol Daerah -Jumlah Parpol Peserta Pemilu	Partai Partai	24 44	24 44	12 15	12 15	12 15	12 15	12 15	12 15		
2.	Karakteristik Politik Masyarakat - Jumlah Pemilih		35,348	35,348	-	-	35,348	-	-	-		
3	Tingkat Partisipasi Pemilih -Jumlah Pemilih	Orang	136,189	136,189	-	-	136,189	-	-	-		
4	Organisasi Kemasyarakatan -Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi	Buah	16	16	35		16		35			

	-Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Jumlah LSM Lokal	9	4	-	-	-	-	-	-
	-Jumlah LSM Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Jumlah LSM Asing/ Internasional yang Beroperasi di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Keamanan, Keterlibatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Jumlah Kriminalitas	73	120	60	-	-	-	-	-
	-Kasus Pertikaian Antar Warga	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. antar etnis	2	3	-	-	-	-	-	-
	2. Antar Wilayah Desa	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB VII

PENUTUP

Dengan tercapainya semua target diatas yang merupakan indikator kinerja dan jugamerupakan indikator sasaran, harapan untuk mencapai visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat terlaksana dengan baik.

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA 2014-2019) Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Arawa, 2014

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS,



Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. 195807413-198604 1 014